



**INFRASTRUKTUR ANTARA PELUANG DAN ANCAMAN TERHADAP
PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN INDONESIA**

Istianah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah Pamekasan, Indonesia
istianah.ghafur97@gmail.com

Abstrak

Latar belakang: Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses pencapaian suatu kehidupan sosial yang maju dan ideal.

Tujuan penelitian: Menganalisis bagaimana peran infrastruktur dalam menumbuhkembangkan perekonomian di Indonesia jika dilihat dari kacamata ekonomi Islam. Setidaknya, permasalahan mengenai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang belum optimal seperti data-data yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada akhirnya, melalui tawaran konsep ekonomi Islam diharapkan dapat memberikan solusi alternatif dalam memecahkan persoalan-persoalan tersebut.

Metode penelitian: Metode penelitian ini menggunakan pengumpulan beberapa teori ekonomi Islam yang dijadikan satu untuk di bandingkan.

Hasil penelitian: Pencapaian sebuah pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari sisi pemenuhan secara materi ataupun kuantitas data-data saja, akan tetapi ditelisik melalui sisi perbaikan sosial dan. Sebab ketika pertumbuhan ekonomi menuai berbagai problem yang pelik, justru akan menjadi pemicu terjadinya keterbelakangan, kekacauan dan akan jauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan sebagaimana yang tertera pada pancasila. Mengingat rancangan utama pembangunan infrastruktur adalah sebagai salah satu cara untuk menumbuhkembangkan perekonomian nasional yang mengacu pada paket kebijakan ekonomi, maka perlu kiranya pemerintah secara proaktif menguatkan kepastian hukum, secara tekstual sah dan nyata secara kontekstual.

Kesimpulan: Cita-cita leluhur ekonomi baik secara konvensional ataupun perspektif Islam adalah melaksanakan misi sebagai ummat di muka bumi dengan tugas memakmurkan, mensejahterakan seluruh aktivitas yang dilakukan agar dapat mewujudkan kualitas perekonomian yang efisien, menstabilkan perekonomian yang kemudian dapat merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Sebab kajian dalam pertumbuhan tidak hanya mengupas tentang aktivitas secara material saja, akan tetapi lebih dari itu pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah aktivitas yang dapat menyeluruh dalam berbagai bidang, termasuk produksi yang bertujuan untuk mendistribusikan secara adil dan merata, sehingga harapan untuk menumbuhkembangkan perekonomian nasional melalui sektor infrastruktur dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan beberapa acuan yang telah dideskripsikan dalam sub pembahasan di atas.

Kata kunci: Infrastruktur, Ancaman, Peluang, Perekonomian

Abstract

Background: Infrastructure development is one of the most important parts in the process of achieving an advanced and ideal social life.

Research purposes: To analyze how the role of infrastructure in developing the economy in Indonesia when viewed from the perspective of Islamic economics. At least, the problems regarding development and economic growth are not yet optimal as the data previously described. In the end, through the offer of the concept of Islamic economics, it is hoped that it can provide alternative solutions in solving these problems.

Research methods: This research method uses the collection of several Islamic economic theories which are combined into one for comparison.

Research results: The achievement of an economic growth is not only seen in terms of material fulfillment or the quantity of data, but also examined through the side of social improvement and. Because when economic growth reaps various complicated problems, it will actually trigger backwardness, chaos and will be far from the values of justice and humanity as stated in Pancasila. Considering that the main design of infrastructure development is as a way to develop the national economy that refers to the economic policy package, it is necessary for the government to proactively strengthen legal certainty, textually legitimate and contextually real.

Conclusion: *The ancestral ideals of economics both conventionally and from an Islamic perspective are to carry out the mission as a ummah on earth with the task of prospering, prospering all activities carried out in order to realize an efficient quality of the economy, stabilizing the economy which can then realize a balance between individual interests and interests. Public. This is because the study of growth does not only examine material activities, but more than that, economic growth is an activity that can be comprehensive in various fields, including production which aims to distribute fairly and equitably, so that the hope is to develop the national economy through the infrastructure sector. can be implemented properly in accordance with some of the references that have been described in the sub-discussion above.*

Keywords: *Infrastructure, Threats, Opportunities, Economy*

Diterima: 26-11-2021; Direvisi: 29-11-2021; Disetujui: 15-12-2021

PENDAHULUAN

Proses ini sejatinya, memerlukan tekad antara pemerintah (Suardika et al., 2021) dan berbagai elemen masyarakat untuk saling bahu membahu melalui serangkaian kompilasi mulai dari proses sosial (Marwan, 2021), ekonomi dan kombinasi institusional demi tercapainya prospek yang lebih baik dalam perputaran kehidupan bermasyarakat di masa yang akan datang (Ervana, 2021).

Proses pembangunan memiliki dua tujuan, meliputi peningkatan ketersediaan terhadap perluasan distribusi dari berbagai macam kebutuhan pokok (Basmar et al., 2021) dan perluasan terhadap pilihan yang ekonomis sebagai peningkatan standar hidup baik secara sosial maupun individual (Sulaiman, 2021).

Dalam pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang ikut serta memengaruhi tolak ukur kehidupan masyarakat suatu negara (Dewi & Fasa, 2021). Pasalnya, negara akan mengalami berbagai macam kesulitan dan dengan cepat melanda kehidupan masyarakat jika perekonomian sebuah negara itu lemah (Miftakhuiddin et al., 2021).

Bila dicermati dengan seksama, pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik dan akan senantiasa menjamin terciptanya kenyamanan (Singgih & Gunarta, 2021), kesejahteraan sosial bagi masyarakat di dalamnya. Namun, pertumbuhan ekonomi menjadi gagal jika tujuan pembangunan ekonomi hanya bertujuan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata, maka hal tersebut akan berpotensi melahirkan hal-hal yang mengarah pada ketidakadilan. Dari adanya ketidakadilan tersebut, maka bisa dipastikan sebuah pembangunan ekonomi yang telah lama dikembangkan akan berakhir pada ketimpangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebab, pembangunan bidang ekonomi tak lain adalah salah satu strategi untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, dikarenakan hal tersebut merupakan sebuah hal yang konkrit dalam memberikan perhatian langsung yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Sehingga tak ditemukan lagi anggapan masyarakat yang mengatakan bahwa dalam berbagai usaha yang dibangun pemerintah, baik dalam bentuk pariwisata, pendidikan ataupun di sektor infrastruktur membuat masyarakat menengah ke bawah merasa tergeser, terjepit dan terpinggirkan oleh sistem perekonomian yang dibuat oleh pemerintah.

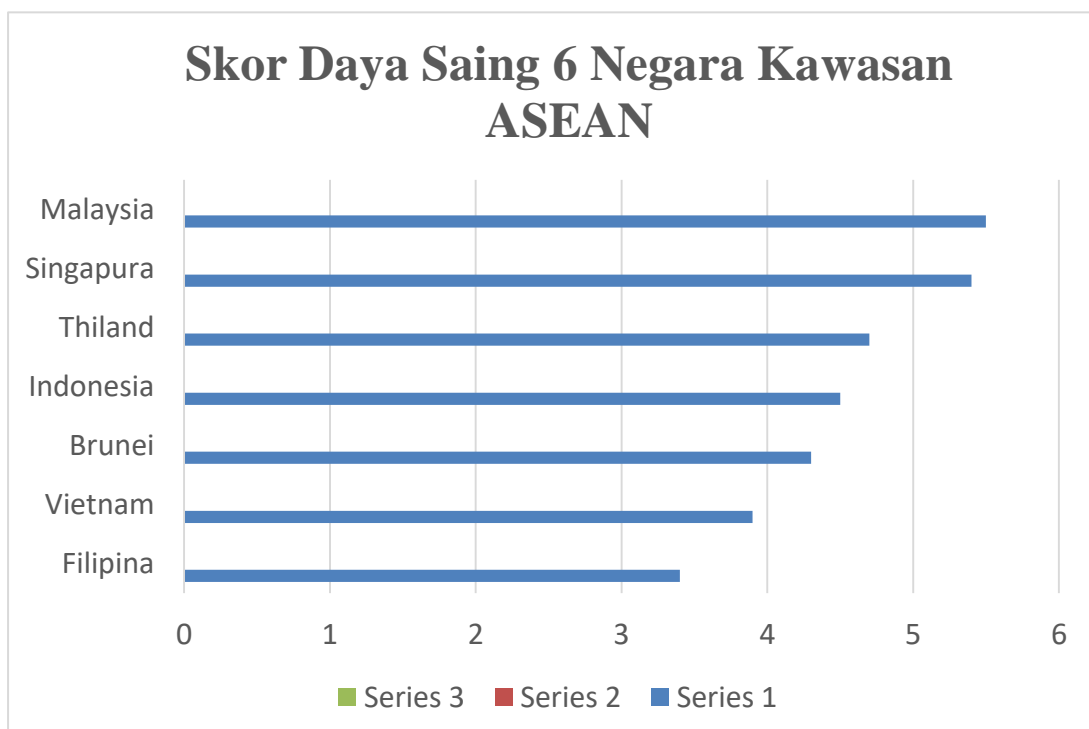
Padahal, pada nyatanya pembangunan ekonomi sesungguhnya hadir untuk mengatasi berbagai problematika yang pelik yang dihadapi oleh sebuah negara. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam membangun dan menumbuhkembangkan perekonomian di Indonesia, dan dapat menunjang tercapainya memenuhi ketersediaan masyarakat, meningkatkan perekonomian bangsa secara universal adalah adanya pembangunan infrastruktur. Pembangunan Infrastruktur merupakan sebuah solusi alternatif yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, baik secara direk ataupun

indirek. Secara terang-terangan, pemberdayaan sumber daya untuk membangun infrastruktur akan sangat memicu proses perkembangan ekonomi yang juga merupakan sebuah prasyarat bagi sektor-sektor lainnya, selain untuk kepentingan ekonomi juga dapat dijadikan sebagai sarana membangun relasi antara satu dengan lainnya.

METODE PENELITIAN

Dari sejumlah literatur yang ada, menyebutkan bahwa sektor infrastruktur perlu dikembangkan untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi nasional agar semakin membaik. Sebab, infrastruktur menjadi salah satu roda penggerak pertumbuhan laju ekonomi untuk mengatasi iklim investasi dan bisnis menjadi lebih menarik agar dapat berdaya saing tinggi dengan negara-negara yang lain. Sehingga pemerintah Indonesia pun memiliki kesadaran akan pentingnya untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di negeri ini.

Grafik di bawah ini menggambarkan jika pertumbuhan ekonomi bangsa ini, masih berada di urutan bawah dibandingkan beberapa negara dalam hal skor daya saing 6 Negara Kawasan ASEAN pada tahun 2017-2018. Berdasarkan laporan *The Global Competitiveness Report 2017-2018* dalam *The World Economic Forum* menyatakan bahwa, daya saing infrastruktur Indonesia mendapatkan skor 4,5 dan menempati peringkat 52 dari keberadaan 137 negara yang berada di bawah ketertinggalan dari beberapa Negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura dan Thailand.



Gambar 1. Grafik Skor Daya Saing 6 Negara ASEAN.

Sumber: Data Market Sentiment Index 18 Desember 2017, data di olah.

Berdasarkan pengolahan data di atas sudah sangat jelas bahwa persaingan di sektor infrastruktur masih jauh tertinggal dibandingkan negara ASEAN lainnya. Tujuan penulisan makalah ini bermaksud menganalisis bagaimana peran infrastruktur dalam menumbuhkembangkan perekonomian di Indonesia jika dilihat dari kacamata ekonomi islam. Setidaknya, permasalahan mengenai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang belum optimal seperti data-data yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada akhirnya, melalui tawaran konsep ekonomi islam diharapkan dapat memberikan solusi alternatif dalam memecahkan persoalan-persoalan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan berbagai deskripsi (Frita et al., 2022), salah satunya sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perkembangan perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa (Sudarmanto et al., 2021). Jika ditarik lebih mengerucut lagi, pertumbuhan ekonomi lebih merujuk pada perubahan yang kuantitatif (*quantitative change*) (Hasdian, 2021) yang dapat diukur dengan menggunakan data produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Husril et al., 2021) atau bisa dikatakan sebagai sebuah pendapatan *output* per kapita (Ananda & Prabowo, 2021).

Selain itu, analisis terhadap pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi (Kristanto HC & Gusaptono, 2021) yang bertujuan untuk menganalisa problematika yang dihadapi oleh sebuah negara berkembang demi mengatasi persoalan perekonomian negara tersebut (Irwan et al., 2021), sehingga bisa dirasakan dampak dan hasil dari pencapaian-pencapaian yang telah dijalankan dapat memaksimalkan perekonomian nasional agar lebih terarah pada perbaikan-perbaikan yang positif.

Tadaro dan Smith menjelaskan, mengenai pertumbuhan ekonomi, ia menuliskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses peningkatan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian secara terus menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu. Sehingga dapat menghasilkan prospek yang tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar. Dalam artian, dengan adanya usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi, keadaan sebuah negara akan menampakkan tolak ukur sebuah kesuksesan dalam menghasilkan sebuah klimaks yang sangat memuaskan.

Menurut Harrod-Domar, pertumbuhan ekonomi berdasarkan teori ekonomi modern lebih menekankan terhadap arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Sebab semakin tinggi investasi yang dilakukan, maka akan semakin baik pula perekonomian nasional. Dikarenakan investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat, akan tetapi juga terhadap penawaran agregat, mulai dari pengaruhnya terhadap kapasitas produksi, hingga perspektif yang lebih panjang investasinya maka akan menambah stok kapital.

Berbeda dengan pendapat Prof. Simon Kuznetas, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara bersangkutan untuk turut menyediakan berbagai kebutuhan barang ekonomi terhadap masyarakat dalam lingkup negara. Yang mana kenaikan kapasitas tersebut didorong oleh kemungkinannya adanya kemajuan ataupun dari penyesuaian-penyesuaian teknologi, ideologi, dan institusional terhadap berbagai keadaan yang ada.

Selanjutnya untuk menilai bagaimana pertumbuhan ekonomi bekerja bisa dilihat dari poin-poin berikut ini, *Pertama*; setidaknya terlebih dahulu dihitung dari pendapatan yang riil, yaitu dari PNB atau PDB yang dihitung berdasarkan harga-harga yang berlaku dalam setiap tahunnya. Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari hasil

pertambahan PNB dan PDB riil yang berlaku dari tahun ke tahun. Maka untuk itu, agar dapat mengetahui perkembangan dan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$1(t-1) = \frac{\text{PDRBT} - \text{PDRB}(t-1)}{\text{PDRBT}-1} \times 100\%$$

Ket:

- R t-1 = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
- PDRBt = Produk Domestik Bruto tahun yang dihitung
- PDRBT (t-1) = Produk Domestik Bruto tahun sebelumnya

Berdasarkan sejumlah pendapat, bahwa teori pertumbuhan ekonomi bisa dijelaskan jika pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah perkembangan yang mencakup pada seluruh perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Dari seluruh pengertiannya pertumbuhan ekonomi menjadi sebuah proses yang berarti melakukan perubahan yang secara terus menerus untuk menaikkan pendapatan perkapita. Hal tersebut bertujuan untuk mengembangkan kemajuan ekonomi nasional dengan jangka panjang yang bertujuan untuk memperbaiki sistem kelembagaan disegala sektor.

Sedangkan, dari sudut pandang ekonomi Islam, ada banyak ahli fiqih yang memberikan perhatian secara khusus terhadap pertumbuhan ekonomi yang memaparkan bahwa maksud dari pertumbuhan ekonomi bukanlah hanya sebatas aktivitas berproduksi saja, akan tetapi lebih dari itu. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah aktivitas yang konteksnya menyeluruh dalam bidang produksi yang sangat berkaitan dengan keadilan distribusi, yang tidak hanya mengupas mengenai problematika ekonomi saja, akan tetapi berhubungan dengan aktivitas manusia yang tidak hanya ditunjukkan pada pertumbuhan saja, namun untuk membangun kemajuan dari sisi material dan spiritual manusia.

Buktinya ada beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari perspektif Islam, diantaranya mengenai batasan mengenai persoalan ekonomi. Berdasarkan perspektif Islam, tentu tidak sama dengan yang di anut oleh kaum kapitalis. Di mana yang menjadi persoalan ekonomi adalah persoalan kekayaan yang menurutnya harus sesuai dengan konsep kapitalis yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditujukan untuk mengatasi berbagai macam persoalan dalam kehidupan manusia. Dalam prakteknya dalam ekonomi pespektif islam, sama halnya dengan konsep konvensional bahwasanya pertumbuhan ekonomi memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri yang meliputi stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan adanya kondisi yang kondusif, sebab stabilitas keadaan merupakan sebuah faktor yang paling utama dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam memahaminya, untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi diperlukan sebuah peraturan perundang undangan yang dapat disesuaikan dengan latar belakang dan kultur masyarakat. Dalam islam, hal ini di atur melalui beberapa nilai diantaranya, norma, etika yang dapat membangun stabilitas ekonomi, sosial dan politik.

Kedua, tingginya kegiatan investasi. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, kegiatan produksi harus tetap dijalankan dengan cara memberdayakan sumber-sumber ekonomi yang terdapat dalam masyarakat, sehingga diperlukan investasi untuk mewujudkannya, dapat dimulai dengan membangun fasilitas-fasilitas kegiatan ekonomi ataupun peralatan dan mesin produksi dengan berbagai sarana transportasi, sehingga pendapatan Negara umumnya dan pendapatan masyarakat secara khusus dapat memberikan peningkatan yang sangat signifikan.

Berdasarkan dua proses di atas, bisa dispesifikkan bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi bagi Negara dan masyarakat, tujuan dan fasilitas yang digunakan

harus sesuai dengan nilai dan prinsip syaria'ah yang berlandaskan dengan Al-quran dan hadist. Walaupun demikian, hal tersebut tidak bisa menafikan konsep dan sistem konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syaria'ah.

Dalam ilmu ekonomi, infrastruktur merupakan wujud dari *public capital* (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah meliputi: Jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan, listrik dan lain-lain. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwasanya infrastruktur cenderung mengarah pada pembahasan barang publik yang disediakan oleh pemerintah.

Definisi infrastruktur dapat dipahami sebagai sebuah kebutuhan dasar fisik dari pengorganisasian sistem struktur yang dibutuhkan untuk jaminan ekonomi di sektor publik dan sektor privat, sebagai layanan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk membuat perekonomian bisa berfungsi dengan baik.

Kemudian, melihat perkembangannya dalam usaha mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dalam menumbuhkembangkan infrastruktur, data *Indonesia Economic Outlook* menunjukkan bahwa pada pemerintahan Jokowi infrastruktur ditempatkan diposisi urgent untuk dijadikan sebagai agenda utama dan mengalokasikan anggaran besar untuk mendorong pembangunan infrastruktur lebih riil dan dapat dirasakan manfaatnya.

Apalagi dikokohkan dengan Skema Pembiayaan yang direncanakan Jokowi-Jk pada berita Kompas bulan November tahun 2017 lalu menyatakan bahwa jumlah anggaran pembangunan infrastruktur pada anggaran pendapatan dan belanja negara dari tahun ke tahun meningkat. Mulai dari 154,7 triliun pada tahun 2014 meningkat menjadi 269, 1 triliun pada tahun 2016 dan mencapai 401, 1 triliun pada APBN-P pada tahun 2017, sedangkan pada anggaran tahun 2018 anggaran infrastruktur kembali meningkat menjadi sedikitnya 410 triliun.

Informasi lainnya yang menunjukkan data-data terbaru mengenai infrastruktur dalam menyambut tahun politik pada akhir tahun 2019 mendatang, Kementerian PUPR akan fokus pada penyelesaian proyek infrastruktur agar tidak ada proyek yang mangkrak di pertengahan kepemimpinan. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa kebijakan program infrastruktur pada tahun 2019 diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan pemerataan hasil pembangunan upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Berdasarkan Penpres No.56 tahun 2018 yang merupakan perubahan kedua Penpres Tahun 2015 lalu mengenai Percepatan Pelaksanaan PSN, di mana sebanyak 150 psn ADA DI Kementerian PUPR. PSN itu sendiri terdiri dari 54 bendungan, 7 irigasi, 1 tanggul laut, 69 jalan tol, 4 jalan nasional, 3 PLBN (tahap 2), 9 air minum dan 3 perumahan telah ditargetkan 2018 selesai 27 proyek PSN dan 47 proyek lainnya akan diselesaikan pada tahun 2019 mendatang.

Dari rentetan renstra Perpres di atas dapat dideskripsikan bahwa belanja modal dan belanja barang berkarakter belanja modal Kementerian PUPR pada tahun ini berjumlah sekitar 81%, sedangkan untuk tahun 2019 mendatang dengan pagu anggaran 110, 73 triliun, komposisinya terdiri dari belanja modal 67,3%, belanja barang berkarakter belanja modal sebesar 16,2%, belanja barang biasa 14,2% dan belanja pegawai 2,3%.

Mengacu pada paket kebijakan ekonomi Jokowi yang ke- XVI yang telah di revisi dan diluncurkan pada bulan November lalu di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Peluncuran paket kebijakan tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian bapak Darmin Nasution yang didampingi oleh Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati sekaligus dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia beserta wakil ketua Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan tentang paket kebijakan bidang infrastruktur yang berisi:

Paket Kebijakan Jilid 1

“Memiliki tiga fokus, pertama mendorong daya saing industri Nasional melalui deregulasi, debirokrasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Kedua, mempercepat proyek strategi Nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional, dan yang ketiga meningkatkan investasi di sektor properti”

Paket Kebijakan Jilid IX

“Mengatur soal percepatan pembangunan infrastruktur tenaga listrik, stabilitasi harga daging, dan peningkatan sektor logistik desa-kota”

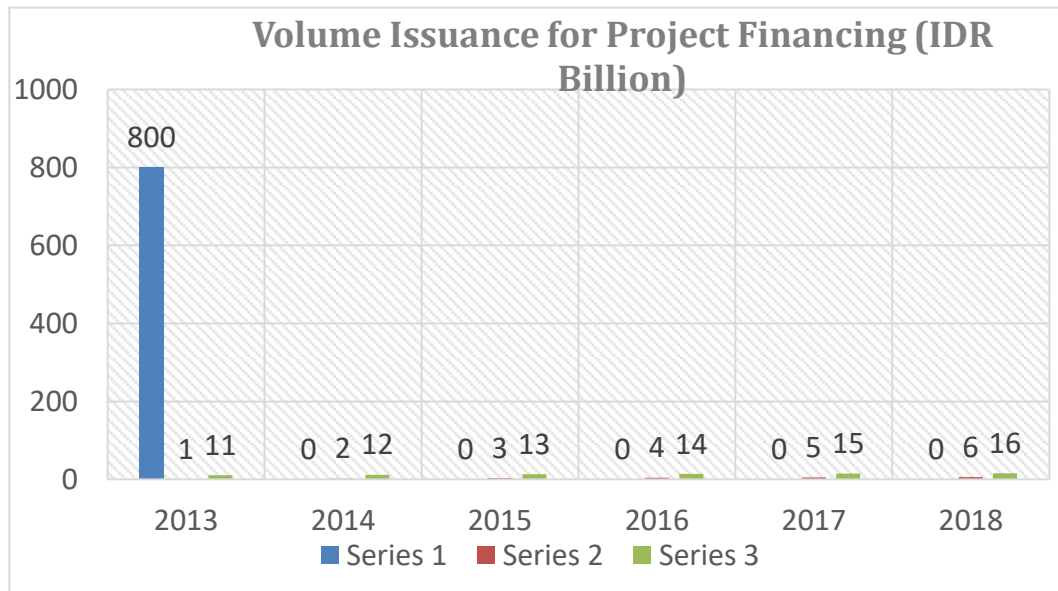
Paket Kebijakan Jilid XIV

“Mengenai peta jalan (roadmap) perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*). *Roadmap* ini diterbitkan guna mencapai tujuan sebagai negara digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara 2020”. Maka, ada beberapa aspek pengaturan mengenai *roadmap e-commerce* meliputi pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan SDM, infrastruktur komunikasi, keamanan siber dan pembentukan manajemen pelaksana.

Dari beberapa paket kebijakan ekonomi yang diantaranya merupakan paket kebijakan yang memiliki korelasi dengan pembangunan infrastruktur, sudah sangat jelas bahwasanya dalam isi kebijakan yang dikeluarkan dan direvisi oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur kembali regulasi Indonesia yang menghambat terhadap terjadinya pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga pengaturan birokrasi di Indonesia dapat memberikan inisiatif kemudahan yang berdampak pada iklim investasi dan perekonomian agar menjadi kondusif dan semakin menguat.

Untuk itu, tak bisa dinafikan bahwa bagian terpenting terhadap pertumbuhan infrastruktur disebabkan oleh adanya stimulus dan peran serta dari berbagai sektor untuk ikut andil dalam menumbuhkembangkan infrastruktur di Indonesia. Diantara fakta yang dapat membantu pertumbuhan infrastruktur begitu cepat adalah dengan adanya dana yang dapat dikembangkan untuk mengelola infrastruktur salah satunya adalah peran Sukuk Negara untuk pembiayaan sebuah proyek.

Sejak tahun 2013 lalu pemerintah mulai mengenalkan skema pembiayaan Sukuk Negara yang *di-eamarked* untuk membiayai proyek infrastruktur (*Project Financing Sukuk*) yang dapat memberikan sebuah alternatif sumber pendanaan yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur agar dapat mendorong perekonomian Islam di Indonesia ke tahap yang lebih tinggi. Kemudian dapat di lihat data di bawah ini bagaimana peran sukuk dalam pembangunan proyek infrastruktur yang sudah memenuhi cakupan dan persyaratan untuk Pembiayaan Sukuk Proyek agar dapat membantu sektor lainnya:



Gambar 2. Proyek Infrastruktur Sumber Dana dari Sukuk Negara.

Sumber: Roadmap Satu Dasawarsa Sukuk Negara, November 2018, data di olah.

Melalui data di atas, dapat dideskripsikan bahwasanya alokasi *Project Financing Sukuk* terus meningkat setiap tahunnya, mulai dari tahun 2013 Sukuk Negara telah berkontribusi dari 800, tahun 2014 maningkat menjadi 1, 500, kemudian pada tahun 2015 terus meningkat yaitu sebesar 7, 100, tahun 2016 sebesar 13, 670, lalu pada tahun 2017 lebih banyak lagi sebesar 16, 700, dan yang terakhir data terbaru pada tahun 2018 yaitu sebesar 22, 500.

Maka kemudian melihat perkembangan di atas dalam menunjang pertumbuhan perekonomian di Indonesia melalui infrastruktur, ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh banyak lapisan masyarakat mengenai adanya infrastruktur sebagai aktivitas ekonomi. *Pertama*, sebagai fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat, *ke dua* sebagai modal sosial masyarakat, *ke tiga* untuk mendorong distribusi aliran produksi barang dan jasa, *ke empat* mendukung kegiatan ekonomi, sosial budaya agar dapat mengembangkan wilayah dan output ekonomi, *ke lima* agar dapat menjalin silaturahmi antar daerah, kota bahkan dengan pihak-pihak luar untuk mengembangkan wawasan pengetahuan.

Akan tetapi, dari beberapa peluang yang dapat mengarah pada pertumbuhan ekonomi nasional yang dapat mempercepat seperti yang telah tergambarkan dari data-data pendukung di atas, ada beberapa problem mengenai infrastruktur yang perlu ditelisik kembali kebenannya guna mempernaiki laju aktivitas ekonomi dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian secara global.

Sebab kenyataannya perkembangan infrastruktur tidak seperti teorinya Pada tahun 2017, saat di lihat anggaran infrastruktur hanya meningkat 177% dari anggaran 2014. Dalam hal tersebut, penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu dampak positif yang timbul dari belanja infrastruktur dan kontruksi yang sampai saat ini belum terlihat.

Selama ini penentuan prioritas pembangunan infrastruktur pasti berkaitkelindan dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Prioritas pembangunan infrastruktur telah

ditetapkan oleh pemerintah pada infrastruktur yang memberikan *multiplire effect* tertinggi bagi bangsa ini. Sayangnya, hal itu hanya diukur dari perhitungan angka-angka ekonometrik saja, dilain sisi perlu diperhatikan bagaimana posisi sosial bahkan kemanusiaan.

Maka menjadi sebuah catatan kritis dalam pembangunan infrastruktur yang ternyata dalam prioritas pengelolaannya hanya diukur dari agenda-agenda Internasional yang akan dihelat oleh Negara. Sepertihalnya saat pelaksanaan *Sea Games, Asian Games, Annual Meeting* ataupun yang lainnya yang mendorong untuk disegerakan selesainya pembangunan infrastruktur di tengah kebutuhan wilayah lain yang mendesak untuk segera mengejar ketertinggalan infrastruktur lainnya.

Padahal sejatinya, infrastruktur merupakan sebuah aset fisik yang memang dirancang dalam sebuah sistem, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, yang dibutuhkan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, baik dari kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Maka seharusnya pertimbangan terhadap dibangunnya pembangunan infrastruktur di prioritaskan pada kebutuhan masyarakat terhadapnya dengan melalui infrastruktur yang memadai. Sebab, kebutuhan manusia yang primer adalah terdiri dari kebutuhan individual dan sosial. Seharusnya negara wajib memastikan semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Jika ternyata kebutuhan individual maupun kolektif sosial yang tak terpenuhi disebabkan ketiadaan infrastruktur, maka posisi disinilah dipandang penting bahwa infrastruktur harus benar-benar diprioritaskan.

Faktanya, sekian persen dari pembangunan infrastruktur adalah didorong atas ambisi pemerintah untuk mencapai prestasi Internasional. Seperti yang telah dipaparkan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono bahwasanya pemerintah terus menggenjot proyek pembangunan agar indeks infrastruktur negara pada tahun 2018-2019 mendatang bisa terus meningkat. Hasil dari seluruh pembangunan tersebut oleh pemerintah hanya dititikberatkan pada kuantitas dan pertumbuhan saja, tidak menitikberatkan pada kebutuhan dan pemerataan.

Sayangnya, di kota-kota besar ketika ditelisik kembali pembangunan infrastruktur pun masih mengalami masalah dalam hal kualitasnya. Pasalnya, infrastruktur yang ada ternyata masih belum mampu mencapai tingkat daya dukung terhadap pertumbuhan penduduk yang pesat beserta segala aktivitas kehidupannya. Dapat di lihat, buruknya infrastruktur sanitasi pembuangan limbah rumah tangga di Jakarta ternyata melahirkan slogan baru yang berbunyi “Jakarta Darurat Tinja”.

Data yang menunjukkan atas buruknya infrastruktur dapat dibuktikan mulai dari data 2,5 juta meter kubik volume tinja yang dihasilkan di Jakarta hanya 3,8% yang masuk ke dalam saluran IPAL, 20% masuk ke dalam septic tank rumah tangga, sedangkan 80% nya volume tinja dibuang ke selokan ataupun sungai. Sehingga tak ayal jika warga Jakarta menggembor-gemborkan slogan tersebut.

Pembahasan mengenai “pembangunan” dalam upaya “menumbuhkembangkan” seringkali menjadi perdebatan pelik yang sukar ditemukan solusinya, termasuk sektor infrastruktur. Jika dilihat dalam konteksnya, permasalahan infrastruktur termasuk sebuah problem yang pelik sebab posisinya yang terlalu sensitif untuk selalu diperdebatkan. Sehingga ada begitu banyak pecahan-pecahan masalah yang perlu ditemukan kebenaran dan perbaikan dalam segala aspek yang berhubungan dengan adanya pembangunan infrastruktur, baik secara acuan terhadap teori pertumbuhan konvensional dan lebih-lebih mengacu pada teori pertumbuhan perspektif ekonomi Islam.

Ekonomi perspektif islam memandang pertumbuhan ekonomi dalam term ekonomi modern adalah dengan cara mengembangkan perekonomian yang dapat menyebabkan barang dan jasa berdampak sangat baik terhadap apa yang diproduksi bagi masyarakat,

sehingga hasil yang ingin dicapai tak lain adalah peningkatan kemakmuran masyarakat. Sebab ekonomi pembangunan sesungguhnya hadir ditujukan khusus untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Menurutnya munculnya serentetan problem terhadap pertumbuhan ekonomi salah satu alasannya adalah disebabkan tidak diperhatikannya variabel lain seperti sosial hukum, politik, budaya dan variabel pembangunan lainnya. Padahal disisi lain ekonomi islam memiliki misi yang jauh lebih luas dan komprehensif, dalam artian ekonomi pembangunan bukan sekedar membangun ekonomi rakyat, melainkan yang lebih penting adalah membangun sikap mental yang berarti pula membangun manusia secara utuh.

Maka kemudian dalam term pembangunan perspektif Islam, konsep dan tujuan ekonomi pembangunan adalah islam melihat pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan kematangan manusia, di mana kemajuan materi harus menunjang kematangan spiritual. Seperti beberapa tujuan penting yang harus diprioritaskan, pertama pertumbuhan ekonomi di sektor infrastruktur diiringi dengan pertumbuhan tenaga kerja penuh, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pengangguran, kemudian menjaga stabilitas ekonomi yang berdampak pada distributif dan kepedulian terhadap alam. Sebab tujuan utama pembangunan sistem ekonomi islam adalah untuk memenuhi kesejahteraan manusia yang mengutamakan integrasi sosial dan konservasi terhadap lingkungan.

Oleh karena itu filsafat dari pembangunan perekonomian Islam ditinjau dari perspektif Islam diantaranya harus memenuhi dasar filosofis yaitu; *Tauhid Rububiyah, Al 'Adalah, Khalifah, Tazkiya*. Dari keempat filosofi di atas dapat di deskripsikan bahwa; *pertama*, pembangunan ekonomi bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, dan material. Dalam artian pembangunan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kemudian yang *kedua* fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan budayanya, dasar filosofis ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja, maka dengan demikian islam telah memperluas wilayah jangkauan obyek dengan pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia.

Selanjutnya adalah pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensional, sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan. Terakhir adalah oenekanan utama dalam pembangunan menurut islam terletak pada pemanfaatan sumber daya alam yang telah dititipkan Allah SWT kepada seluruh manusia dan lingkungannya semaksimal mungkin, selain itu, pemanfaatan sumber daya tersebut harus melalui pembagian yaitu peningkatannya secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran.

Dari tinjauan perspektif di atas, Islam telah memberikan solusi terhadap berbagai problem yang menjadi pelik dalam membangun perekonomian nasional dengan cara mengimplementasikan beberapa solusi di atas untuk meningkatkan stabilitas pertumbuhan ekonomi yang sah secara syari dan nyata secara hukum. Kemudian secara data baik secara teori ataupun secara posisi Infrastruktur di Negara, ada beberapa catatan terhadap pemerintah dalam meneumbuhkan perekonomian sektor infrastruktur, diantaranya pencapaian sebuah pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari sisi pemenuhan secara materi ataupun kuantitas data-data saja, akan tetapi ditelisik melalui sisi perbaikan sosial dan. Sebab ketika pertumbuhan ekonomi menuai berbagai *problem* yang pelik, justru akan menjadi pemicu terjadinya keterbelakangan, kekacauan dan akan jauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan sebagaimana yang tertera pada pancasila.

Mengingat rancangan utama pembangunan infrastruktur adalah sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan perekonomian nasional yang mengacu pada paket

kebijakan ekonomi, maka perlu kiranya pemerintah secara proaktif menguatkan kepastian hukum, secara tekstual sah dan nyata secara kontekstual.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa cita-cita leluhur ekonomi baik secara konvensional ataupun perspektif Islam adalah melaksanakan misi sebagai ummat di muka bumi dengan tugas memakmurkan, mensejahterakan seluruh aktivitas yang dilakukan agar dapat mewujudkan kualitas perekonomian yang efisien, menstabilkan perekonomian yang kemudian dapat merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Sebab kajian dalam pertumbuhan tidak hanya mengupas tentang aktivitas secara material saja, akan tetapi lebih dari itu pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah aktivitas yang dapat menyeluruh dalam berbagai bidang, termasuk produksi yang bertujuan untuk mendistribusikan secara adil dan merata, sehingga harapan untuk menumbuhkembangkan perekonomian nasional melalui sektor infrastruktur dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan beberapa acuan yang telah dideskripsikan dalam sub pembahasan di atas.

BIBLIOGRAFI

- Ananda, A. R. O. R., & Prabowo, P. S. (2021). Analisis Disparitas Pendapatan Dan Pengujian Hipotesis Kuznet Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2019. *INDEPENDENT: Journal of Economics*, 1(2), 196–205.
- Basmar, E., Sartika, S. H., Suleman, A. R., Faried, A. I., Damanik, D., Amruddin, A., Purba, B., Wisnujati, N. S., & Nugraha, N. A. (2021). *Ekonomi Pembangunan: Strategi dan Kebijakan*. Yayasan Kita Menulis.
- Dewi, S. P., & Fasa, M. I. (2021). Investasi Dan Inflasi Sebagai Instrumen Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 3(02), 17–32.
- Ervana, H. C. (2021). *Pengorganisasian masyarakat dalam penguatan ekonomi rumah tangga melalui bank sampah Desa Kloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Frita, N., Hamdani, I., & Devi, A. (2022). Pengaruh Inklusi Keuangan dan Bank Syariah terhadap Infrastruktur Nasional Dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Program SDGs. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(1), 155–182.
- Hasdian, I. K. (2021). *Paradoks Kebijakan Tata Ruang Wilayah Terhadap Desa Tepian Kota*.
- Husril, H., Zuhri, N., & Valeriani, D. (2021). Hubungan antara Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Analisis Panel Vector Auto Regression (PVAR). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(3), 168–177.
- Irwan, S. I. P., Adam Latif, M. A. P., Ahmad Mustanir, S. I. P., & Kamaruddin Sellang, S. A. P. (2021). *Pendekatan Partisipatif: Implementasi Perencanaan Pembangunan*. Media Sains Indonesia.
- Kristanto HC, R., & Gusaptono, R. H. (2021). *Pengenalan Literasi Keuangan Untuk Mengembangkan UMKM*.
- Marwan, S. H. (2021). *Tantangan Dan Peluang Generasi Milenial Era Pandemi*. Edited by Sri Handayani Marwan. 1st ed. Surakarta: UNISRI Press.
- Miftakhuddin, M., Lestari, K. T., Aniroh, A., & Adinugraha, H. H. (2021). Pendayagunaan Wakaf di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 76–90.

- Singgih, M. L., & Gunarta, I. K. (2021). *Manajemen Produktivitas Perusahaan*. ITS Tekno Sains.
- Suardika, K., Sulistyoko, A., Budiyo, F., Susanto, H., Kamal, F., & Manaf, A. (2021). *Teori dan Aplikasi Pendidikan Kewarganegaran*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Sudarmanto, E., Syaiful, M., Fazira, N., Hasan, M., Muhammad, A., Faried, A. I., Tamara, S. Y., Muliarta, A., Nainggolan, L. E., & Prasetyo, I. (2021). *Teori Ekonomi: Mikro dan Makro*. Yayasan Kita Menulis.
- Sulaiman, E. S. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan: Teori dan Implementasi*. UGM PRESS.
-



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License